



Penyuluhan Kota Layak Anak Sebagai Wujud Sustainable Cities and Communities Melalui Pembuatan Mading di TK Islam Nurul Qur'an Depok

Wardani Rizkianti^{1*}, Sindy Yulia Putri², Nurmasari Situmeang³, Bastian Chandra⁴,
Fariezka Safa Salsabila⁵, & Nurul Alya Maulidah⁶

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum, ^{2,3,4,5,6}Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*Corresponding Author. Email: wardanirizkianti@upnvj.ac.id

Abstract: This community service activity aims to increase the understanding of teachers and parents of Nurul Qur'an Islamic Kindergarten students about child-friendly cities as a form of effort to achieve sustainable cities and communities (SDGs 11). This service was implemented using counseling, which consists of lectures, demonstrations, and small group discussions. The instrument for evaluating this activity used questionnaires and then analyzed descriptively. The results of this service showed the increased understanding of teachers and parents of Nurul Qur'an Islamic Kindergarten students regarding the fulfillment of children's needs, which included the right to obtain identity, get an education, play, get protection, recreation, get food, get health insurance, and get national status. Counseling on child-friendly cities through mading (wall magazine) also increased the awareness of parents, especially mothers, that sustainable cities and communities as a global development agenda (SDGs) start from the smallest unit, namely the family.

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru dan orang tua murid TK Islam Nurul Qur'an mengenai kota layak anak sebagai wujud dari upaya mencapai *sustainable cities and communities* (SDGs 11). Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan penyuluhan yang terdiri dari ceramah, demonstrasi, dan *small group discussion*. Instrumen evaluasi kegiatan ini menggunakan kuesioner dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman guru dan orang tua murid TK Islam Nurul Qur'an mengenai pemenuhan kebutuhan anak yang meliputi hak untuk mendapatkan identitas, mendapatkan Pendidikan, bermain, mendapatkan perlindungan, rekreasi, mendapatkan makanan, mendapatkan jaminan kesehatan, dan mendapatkan status kebangsaan. Penyuluhan kota layak anak melalui mading juga semakin meningkatkan kesadaran para orang tua khususnya para ibu bahwa kota dan komunitas berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global (SDGs) dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga.

Article History:

Received: 29-07-2023
Reviewed: 15-09-2023
Accepted: 04-10-2023
Published: 19-11-2023

Key Words:

Counseling;
Sustainable Cities and Communities; Child-Friendly Cities; Wall Magazine

Sejarah Artikel:

Diterima: 29-07-2023
Direview: 15-09-2023
Disetujui: 04-10-2023
Diterbitkan: 19-11-2023

Kata Kunci:

Penyuluhan; Sustainable Cities and Communities; Kota Layak Anak; Mading.

How to Cite: Rizkianti, W., Putri, S., Situmeang, N., Chandra, B., Salsabila, F., & Maulidah, N. (2023). Penyuluhan Kota Layak Anak Sebagai Wujud Sustainable Cities and Communities Melalui Pembuatan Mading di TK Islam Nurul Qur'an Depok. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 4(4), 899-908. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v4i4.8660>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v4i4.8660>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Beragam media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan informasi termasuk informasi mengenai *sustainable development goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan 11 yaitu *sustainable cities and communities*. Tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan pemukiman yang lebih berkelanjutan di tahun 2030, melalui RAN



TPB ditetapkan 10 target nasional. Kesepuluh target tersebut meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur, dan pelayanan perkotaan, resiko bencana dan perubahan iklim di kawasan perkotaan. Maka dari itu, beragam upaya dilakukan untuk mencapai target-target tersebut yang dijabarkan di berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Beberapa target yang turut menjadi perhatian mencakup 1) Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua; 2) Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas (UCLG, 2020).

Perumahan dan komunitas berkelanjutan sejatinya merupakan subjek yang sangat komprehensif terkait aspek keberlanjutan fisik, sosial, dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan 11 tersebut, perlu peran negara sebagai *state actor* dan non-negara sebagai *non-state actor* di ranah hubungan internasional. Salah satu wujud dari tujuan 11 yaitu kota ramah anak. Inisiatif Kota Ramah Anak (CFCI) adalah program global yang dipimpin oleh UNICEF yang membantu kota melindungi dan mempromosikan hak anak berdasarkan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Inisiatif yang dimulai pada tahun 1996 dan telah menyebar ke seluruh dunia, bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan mitra lainnya seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, media, dan anak-anak itu sendiri untuk menjadikan kota dan komunitas lebih ramah anak. CFCI sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UNICEF, 2017). Pengembangan kota layak anak merupakan salah satu cara pemerintah memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak anak, yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (CRC). CRC mencakup beberapa prinsip yang memandu pengembangan kota ramah anak, termasuk hak atas non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, dan hak untuk mempertimbangkan pandangan mereka. Selain prinsip-prinsip tersebut, pengembangan kota ramah anak juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti pemerataan dan inklusi, akuntabilitas dan transparansi, partisipasi publik, kemampuan beradaptasi, dan keberlanjutan, yang semuanya terkait dengan CRC (Braga, 2022).

Inisiatif kota ramah anak atau kota layak anak (CFCI) bertujuan untuk mempromosikan konsep menghormati martabat anak sebagai individu yang memiliki hak dan untuk menjembatani kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan. Secara historis, anak-anak belum dipandang setara dan belum diperlakukan secara bermartabat, namun Konvensi Hak-Hak Anak, yang mulai berlaku pada tahun 1990, telah mengubah sikap terhadap anak dan masa kanak-kanak dengan beralih dari pendekatan berbasis amal ke pendekatan berbasis hak dan mengakui anak-anak sebagai agen aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pengasuh dan orang dewasa lainnya memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak saat mereka tumbuh dan menjadi dewasa (UNICEF, 2017). Kota layak anak adalah suatu sistem tata kelola dimana pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak. Ini melibatkan integrasi sumber daya dan komitmen dari berbagai sektor untuk memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan (Rumtianing, 2016). Untuk memastikan bahwa pemerintah kota secara konsisten bertindak demi kepentingan terbaik anak-anak dan bahwa kota-kota adalah tempat di mana hak-hak anak atas lingkungan yang sehat, protektif,



edukatif, merangsang, nondiskriminatif, inklusif, dan kaya budaya ditegakkan, konsep “kota ramah anak” telah dikembangkan. maju (Riggio, 2022).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menciptakan kota layak anak pada tahun 2005. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di suatu daerah. Ditegaskan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Sesuai dengan kebijakan nasional, setiap pemerintah daerah mengadopsi kebijakan ramah anak yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hanya 100 daerah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan daerah untuk menangani perlindungan anak (Winata, 2017). Dengan menerapkan kota layak anak, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan prioritas utama perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan 40 kota dan kabupaten di Indonesia sebagai “Kota dan Kabupaten Layak Anak” pada tulisan ini (Zuraya, 2017).

Mengacu pada kondisi umum yang telah diuraikan sebelumnya, kota layak anak sebagai wujud tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 11 sejatinya harus bisa dijawantahkan di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia termasuk di ranah orang tua, guru, dan murid-murid di tingkat PAUD, TK, SD hingga tingkat perguruan tinggi (Simanjuntak, 2017; Maritha & Uty, 2022). Maka dari itu, penggunaan media pembelajaran seperti mading dengan beragam gambar menarik dan interaktif menjadi media relevan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai SDGs 11. Kemudian, Sesuai dengan Renstra PKM yang disampaikan oleh LPPM UPNVJ, kegiatan pengabdian ini akan menghasilkan output berupa artikel jurnal nasional ber-ISSN sehingga bisa dibaca oleh khalayak umum dan menjadi referensi untuk kegiatan serupa.

Secara khusus, para guru, orang tua dan murid yang bersekolah di TK Islam Nurul Qur'an di Jl. Cilobak Raya No. 02 RT 01 RW 07, Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih membutuhkan informasi komprehensif mengenai *sustainable cities and communities* yang lebih bersifat akar rumput sehingga mudah dipahami bersama. Terlebih lagi, kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk, sehingga penyuluhan terkait SDGs 11 sangat relevan untuk direfleksikan bersama. Selanjutnya dari hasil wawancara, sekitar 85% para guru dan orang tua menyatakan bahwa mereka dan anak-anak mereka yang merupakan murid-murid TK Islam Nurul Qur'an sangat menyukai kegiatan menggambar dan mewarnai sebagai aktivitas *family time*, sehingga mading akan menjadi media belajar yang relevan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru, orang tua, dan murid TK Islam Nurul Qur'an mengenai kota layak anak sebagai wujud dari upaya mencapai *sustainable cities and communities*. Kegiatan ini juga sekaligus mendukung pemenuhan indikator kinerja utama (IKU) dosen berkegiatan di luar kampus untuk bermanfaat di masyarakat. Fokus pengabdian ini adalah pembuatan beragam gambar menarik terkait kota ramah anak dengan mengacu pada *sustainable cities and communities*.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan secara tatap muka langsung (*offline*) di TK Islam Nurul Qur'an. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan penyuluhan yang



terdiri dari ceramah, demonstrasi, dan *small group discussion* (SGD). Pelaksanaan PKM melalui metode tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tim pelaksana PKM akan mempresentasikan mengenai makna *sustainable cities and communities* (SDGs 11), upaya Indonesia dalam memenuhi target SDGs 11, peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kota layak anak, dan civitas akademika untuk berkontribusi dalam memberikan pengetahuan terkait kota layak anak sebagai manifestasi dari SDGs 11.
- 2) Metode demonstrasi merupakan metode panyajian pelajaran dengan memeragakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan (Huda, 2013). Maka dari itu, dalam pelaksanaan PKM, tim PKM mencontohkan pembuatan mading interaktif dengan beragam desain menarik dari aplikasi dan juga secara manual.
- 3) Metode *small group discussion* (SGD) merupakan pembelajaran dengan membentuk kelompok kecil yang mana bertujuan agar siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah terkait teori atau permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Trianto, 2011). Metode ini dimanfaatkan untuk merekatkan interaksi antarpeserta, membuat kegiatan menjadi lebih menyenangkan, dan meningkatkan potensi keberhasilan kegiatan terkhusus pada peningkatan pemahaman, kreativitas, dan keterampilan para peserta. Melalui kegiatan ini, orang tua dan anak akan semakin lebih sering berinteraksi di sekolah dan diharapkan juga di rumah.

Instrumen penelitian ini adalah *pre-post* kuesioner. Instrumen ini digunakan untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan, sikap, atau perilaku sebelum dan sesudah intervensi. Metode ini melibatkan pemberian kuesioner kepada peserta sebelum intervensi dan kemudian kembali memberikan kuesioner kepada peserta setelah intervensi. Perbedaan antara skor *pre-test* dan *post-test* kemudian digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas berbagai jenis intervensi (Putra & Soetikno, 2018; Ferianto & Hidayat, 2019). Untuk teknik analisis, data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pola dan karakteristiknya secara rinci.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Sebelum kegiatan penyuluhan berlangsung, tim PKM menyediakan kuesioner yang diisi oleh para orang tua. Sementara untuk murid, tim PKM menanyakan satu per satu secara langsung, karena dari aspek kognitif akan lebih mudah memperoleh jawaban melalui komunikasi verbal dengan murid TK.

Kuesioner Pra Penyuluhan Kota Layak Anak

1. Apakah Anda mengetahui apa itu kota layak anak?

Ya, saya tahu

Sedikit pernah

Tidak pernah

2. Apakah Anda mengetahui apa saja hal-hal yang seharusnya dimiliki anak-anak?

Ya, saya tahu

Sedikit tahu

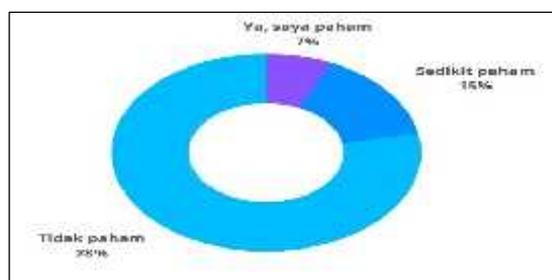
Tidak tahu

Gambar 1. Kuesioner sebelum Penyuluhan



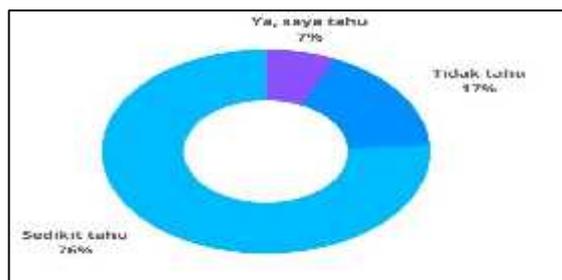
Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan peserta tentang konsep "kota layak anak" serta hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak. Pertanyaan pertama adalah seputar pemahaman peserta tentang wujud kota layak anak. Peserta diminta untuk menyatakan sejauh mana mereka memahami konsep tersebut. Selanjutnya, pertanyaan kedua menanyakan apakah peserta mengetahui hak-hak apa saja yang harus dimiliki oleh anak-anak. Peserta diminta untuk menyebutkan beberapa hak anak yang seharusnya diakui, yang mencakup hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Pada pertanyaan ketiga, peserta diminta untuk menyebutkan jumlah hak anak yang mereka ketahui menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta tentang hak-hak anak yang diakui oleh pihak berwenang. Pertanyaan keempat ditujukan kepada para orang tua di antara peserta. Mereka diminta untuk mengungkapkan sejauh mana mereka senang atau gemar menghabiskan waktu bersama anak dalam bermain, menggambar, dan berekreasi. Pertanyaan ini mencerminkan pentingnya interaksi positif antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan anak. Terakhir, pertanyaan kelima menanyakan apakah peserta pernah mengikuti penyuluhan atau seminar mengenai kota layak anak sebelumnya. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi peserta dalam acara atau kegiatan sejenis sebelumnya.

Dengan menggunakan kuesioner ini sebelum penyuluhan dimulai dapat memberikan gambaran awal mengenai pemahaman dan pengetahuan peserta (Pitayanti & Hartono, 2020; Kartikasari et al, 2021) tentang kota layak anak serta hak-hak anak. Hal ini membantu penyelenggara untuk menyesuaikan materi dan pendekatan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan peserta yang hadir.



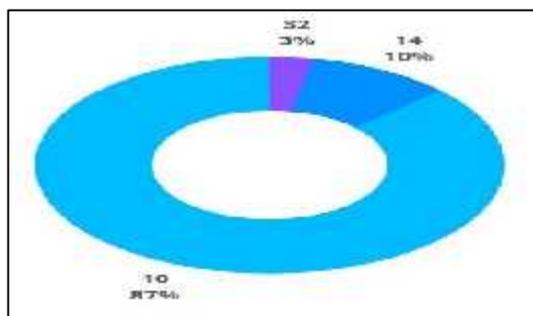
Grafik 1. Pemahaman mengenai Wujud Kota Layak Anak

Dari kuesioner sebelum penyuluhan, diperoleh data dari grafik 1 yakni sekitar 78% orang tua belum memahami dengan optimal mengenai seperti apa wujud kota layak anak sebagai bentuk pencapaian SDGs 11 yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Sementara 15% lainnya sedikit memahami seperti apa wujud kota layak atau kota ramah anak dan hanya 7% dari para orang tua yang memahami perwujudan kota layak anak.



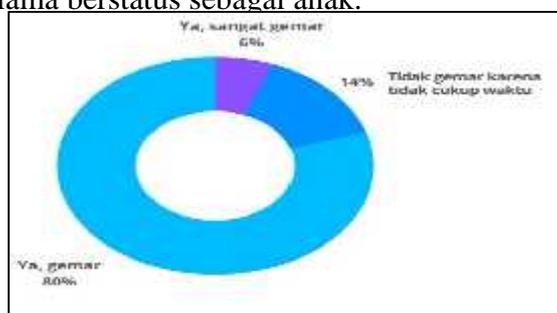
Grafik 2. Pengetahuan mengenai Hak Anak

Pada grafik 2 menunjukkan bahwa hanya 7% orang tua yang mengetahui ragam hak yang harusnya dimiliki anak-anak. Sementara 76% di antaranya menjawab sedikit mengetahui mengenai pemenuhan hak anak dan 17% lainnya tidak mengetahui hak-hak yang idealnya dimiliki anak-anak.



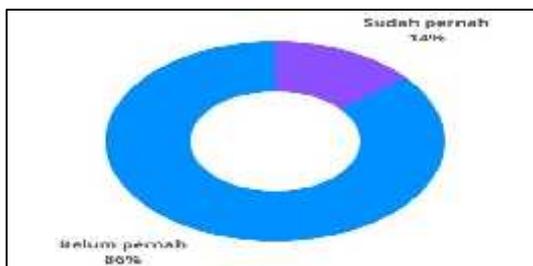
Grafik 3. Pengetahuan mengenai Jumlah Hak Anak menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Selanjutnya mengacu pada grafik 3 di atas, hanya 3% orang tua yang mengetahui bahwa ada sekitar 32 hak anak yang perlu dipenuhi menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Selebihnya, 10% orang tua mengetahui hal tersebut, namun persentase jawaban terbesar ada di angka 10. Sebanyak 87% orang tua menjawab bahwa anak hanya memiliki 10 hak untuk dipenuhi. Persentase di nomor ini merefleksikan bahwa masih minimnya pengetahuan para prang tua bahwa anak sebetulnya memiliki banyak sekali hak yang harus ia peroleh selama berstatus sebagai anak.



Grafik 4. Kegemaran Mbersamai Anak

Grafik 4 di atas menggambarkan sekitar 80% orang tua menyatakan bahwa mereka gemar mbersamai anak dalam bermain, menggambar, dan berekreasi dan 6% di antaranya sangat gemar menghabiskan waktu dengan anak-anak mereka. Namun sekitar 14% orang tua memang tidak bisa berlama-lama mbersamai kegiatan anak karena tuntutan pekerjaan sebagai *working moms*.



Grafik 5. Keikutsertaan di dalam Seminar Kota Layak Anak

Kemudian melalui hasil kuesioner, grafik 5 merepresentasikan bahwa menambah pengetahuan mengenai kota layak anak dengan mengikuti berbagai seminar belum menjadi prioritas utama bagi para orang tua. Sebanyak 86% orang tua belum pernah mengikuti

penyuluhan atau seminar kota layak anak. Menurut mereka, bukan hanya karena minimnya akses untuk mengikuti seminar tatap muka melainkan juga karena kurangnya kesadaran terhadap kebutuhan anak terhadap kota layak anak.

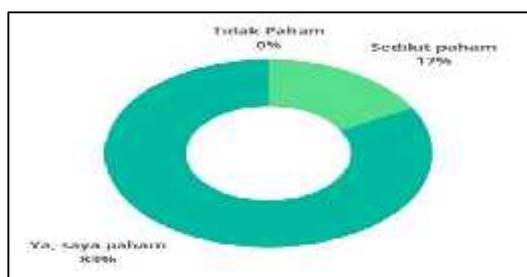


Gambar 2. Kuesioner setelah Penyuluhan

Setelah penyuluhan tentang kota layak anak selesai dilaksanakan, tim PKM mengambil langkah lebih lanjut untuk mengumpulkan feedback dari para orang tua yang hadir. Mereka membagikan link kuesioner berisi beberapa pertanyaan terkait pemahaman dan reaksi para orang tua terhadap materi penyuluhan yang telah disampaikan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut:

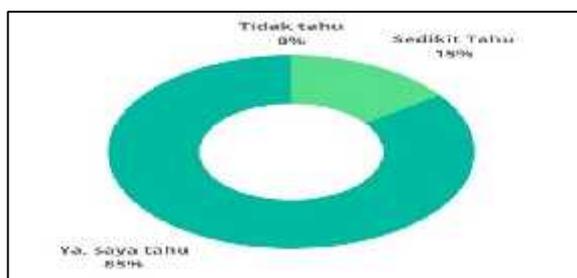
Pertama, tim PKM bertanya kepada para orang tua apakah mereka memahami konsep kota layak anak yang telah dijelaskan dalam penyuluhan. Selanjutnya, tim PKM menanyakan apakah para orang tua mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak, sesuai dengan isu yang telah dibahas. Kemudian, tim PKM mengajukan pertanyaan mengenai jumlah hak anak yang diketahui oleh para orang tua, sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Berikutnya, para orang tua diminta untuk memberikan pendapat mereka mengenai penyuluhan kota layak anak sebagai wujud Sustainable Development Goal 11 (SDGs 11) melalui pembuatan mading. Mereka diundang untuk berbagi pandangan dan tanggapan mereka tentang upaya menciptakan kota yang berkelanjutan melalui kegiatan tersebut. Terakhir, tim PKM mengevaluasi apakah kegiatan penyuluhan ini telah mempengaruhi komitmen para orang tua dalam memenuhi hak-hak anak mereka untuk mendukung pencapaian SDGs 11.

Dengan mengumpulkan tanggapan dari para orang tua melalui kuesioner ini, tim PKM berharap dapat mengevaluasi efektivitas penyuluhan dan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan (Nilasari et al, 2021). Tanggapan ini akan membantu tim untuk memperbaiki dan mengembangkan kegiatan penyuluhan yang lebih efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan kota layak anak dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals 11.



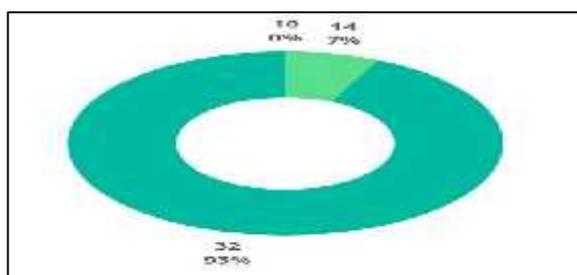
Grafik 6. Pemahaman mengenai Wujud Kota Layak Anak Pasca Penyuluhan

Setelah mengikuti penyuluhan kota layak anak, sejumlah 83% orang tua telah memahami wujud kota layak anak seperti fasilitas taman bermain yang lengkap dan aman, lapangan bola untuk berolah raga, fasilitas kelas yang memadai, dan sebagainya. Mereka juga telah memahami kota layak anak sebagai indikator utama dalam mencapai agenda pembangunan global SDGs 11 khususnya 11.2 dan 11.7 yang berkorelasi langsung dengan anak.



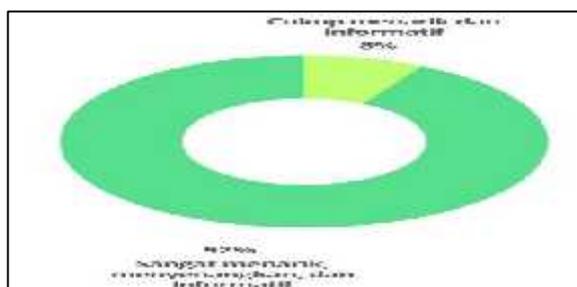
Grafik 7. Pengetahuan mengenai Hak Anak Pasca Penyuluhan

Selanjutnya, 85% orang tua menjawab bahwa mereka telah mengetahui berbagai hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak. Hanya 15% yang menjawab sedikit mengetahui tentang hak-hak anak tersebut.



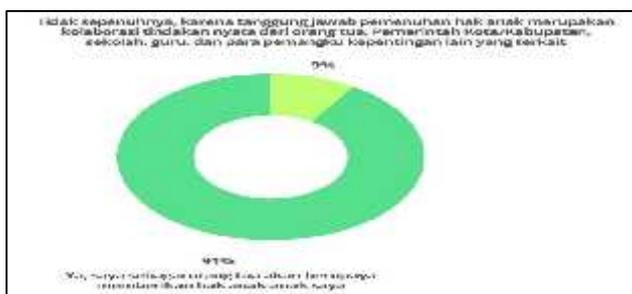
Grafik 8. Pengetahuan mengenai Jumlah Hak Anak menurut Kementerian PPPA RI Pasca Penyuluhan

Pasca penyuluhan, 93% orang tua mengetahui dan memahami dengan benar bahwa terdapat setidaknya 32 hak anak yang dirumuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Sekitar 7% di antara mereka masih menjawab 17 hak yang dimiliki anak dan tidak ada orang tua yang tidak mengetahui jenis hak anak.



Grafik 9. Pengetahuan mengenai Jumlah Hak Anak menurut Kementerian PPPA RI Pasca Penyuluhan

Setelah pelatihan, 92% orang tua berpendapat bahwa kegiatan PKM dengan judul “Penyuluhan Kota Layak Anak Sebagai Wujud *Sustainable Cities and Communities* melalui Pembuatan Mading di TK Islam Nurul Qur’an Depok” sangat menarik, menyenangkan, dan informatif untuk memperluas wawasan orang tua dan murid. Kemudian sekitar 8% orang tua menyatakan bahwa aktivitas PKM ini cukup menarik dan informatif.



Grafik 10. Upaya Pemenuhan Hak Anak

Kemudian terkait pemenuhan hak anak, 91% orang tua menyatakan bahwa mereka akan lebih berupaya dalam memenuhi berbagai hak anak-anak mereka untuk mendukung pencapaian SDGs 11. Namun 9% lainnya menyatakan bahwa pemenuhan hak anak bukan merupakan tanggung jawab penuh orang tua, melainkan kolaborasi tindakan nyata dari orang tua, Pemerintah Kota/Kabupaten, sekolah, guru, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman guru dan orang tua murid TK Islam Nurul Qur'an mengenai pemenuhan kebutuhan anak yang meliputi hak untuk mendapatkan identitas, mendapatkan Pendidikan, bermain, mendapatkan perlindungan, rekreasi, mendapatkan makanan, mendapatkan jaminan kesehatan, dan mendapatkan status kebangsaan. Penyuluhan kota layak anak melalui mading juga semakin meningkatkan kesadaran para orang tua khususnya para ibu bahwa kota dan komunitas berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global (SDGs) dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga.

Saran

Saran yang disampaikan bagi Pimpinan TK Islam Nurul Quran Depok yakni agar diperkuatnya kerjasama yang lebih baik antara pihak TK Islam Nurul Qur'an Depok dan orang tua. Selama PKM berlangsung, siswa TK masih membutuhkan bimbingan, terutama saat small group discussion. Di aktivitas ini, para orang tua, siswa, dan para guru TK perlu bersinergi lebih baik, sehingga orang tua dan siswa TK bisa cepat memahami materi mengenai sustainable cities and communities melalui visualisasi mading. Kami mengharapkan kerjasama yang berkelanjutan sehingga nantinya tidak hanya orang tua dan siswa TK yang berpartisipasi di kegiatan PKM, namun juga orang tua dan siswa TPA yang memiliki jadwal belajar mengaji di sore hari, sehingga kuantitas peserta bertambah dan interaksi antar peserta semakin intens.

Ucapan Terima Kasih

Tim PKM berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan dukungan dana untuk kegiatan PKM Dasar tahun 2023.

Daftar Pustaka

Braga, A. (2022, May 17). How child friendly cities are contributing to children's development and wellbeing. Retrieved from Humanium: <https://www.humanium.org/en/how-child-friendly-cities-are-contributing-to->



[childrens-development-and-wellbeing/](#)

- Ferianto, K., & Hidayati, U. N. (2019). Efektifitas Pelatihan Penanggulangan Bencana Dengan Metode Simulasi Terhadap Perilaku Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada Siswa Sman 2 Tuban. *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 5(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.36053/mesencephalon.v5i2.110>
- Huda, M. 2013. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kartikasari, D., Nurlaela, E., & Mustikawati, N. (2021). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dengan Edukasi Vaksinasi Covid-19. *Link*, 17(2), 145-149.
- Maritha, D., & Uty, H. (2022). Permasalahan Dan Strategi Pencapaian Provinsi Layak Anak, Studi Kasus Di Provinsi Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 56-68.
- Nilasari, B. M., Risqiani, R., Anggraini, S. I., & Alisa, I. A. (2021). pelatihan pembukuan bagi pelaku umkm yang tergabung dalam forum umkm ikm kecamatan tajur halang-bogor. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMIN)*, 3(1).
- Pitayanti, A., & Hartono, A. (2020). Sosialisasi Penyakit Skizofrenia Dalam Rangka Mengurangi Stigma Negatif Warga di Desa Tambakmas Kebonsari-Madiun. *Journal of Community Engagement in Health*, 3(2), 300-303.
- Putra, A. S., & Soetikno, N. (2018). Pengaruh intervensi psikoedukasi untuk meningkatkan achievement goal pada kelompok siswi underachiever. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(1), 254-261. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1514>
- Riggio, E. (2022). Child Friendly Cities: Good Governance in The Best Interests of The Child. *Journal Environment & Urbanization Volume 14 No 2*.
- Rumtianing, I. (2016). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27, Nomor 1, 7-12.
- Simanjuntak, F. N. (2017). Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 10(2), 169-195.
- Trianto, (2011). Model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik: konsep landasan teoritis-praktis dan implementasinya. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- UNICEF. (2017). Child friendly cities. Retrieved from UN International Children's Emergency Fund: <https://www.unicef.org/turkiye/en/child-friendly-cities>
- United Cities and Local Governments. 2020. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui Pemerintah Daerah, 1-24, <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>
- Winata, D. K. (2017, December 29). Perda Perlindungan Anak Masih Minim. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/138381/perda-perlindungan-anak-masih-minim>
- Zuraya, N. (2017). 40 Kota di Indonesia Menuju Kota Layak Anak. Retrieved from Republika: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/13/ot197m-40-kota-di-indonesia-menuju-kota-layak-anak>